

**ANALISIS KINERJA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) DALAM MASA PANDEMI  
COVID-19 DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2020**

AZHAR THAHIR  
NPP. 29.1935

*Asdaf Provinsi Sulawesi Barat  
Program Studi Keuangan Publik*

Email:  
asharthahir.ipdn6@gmail.com

**ABSTRACT**

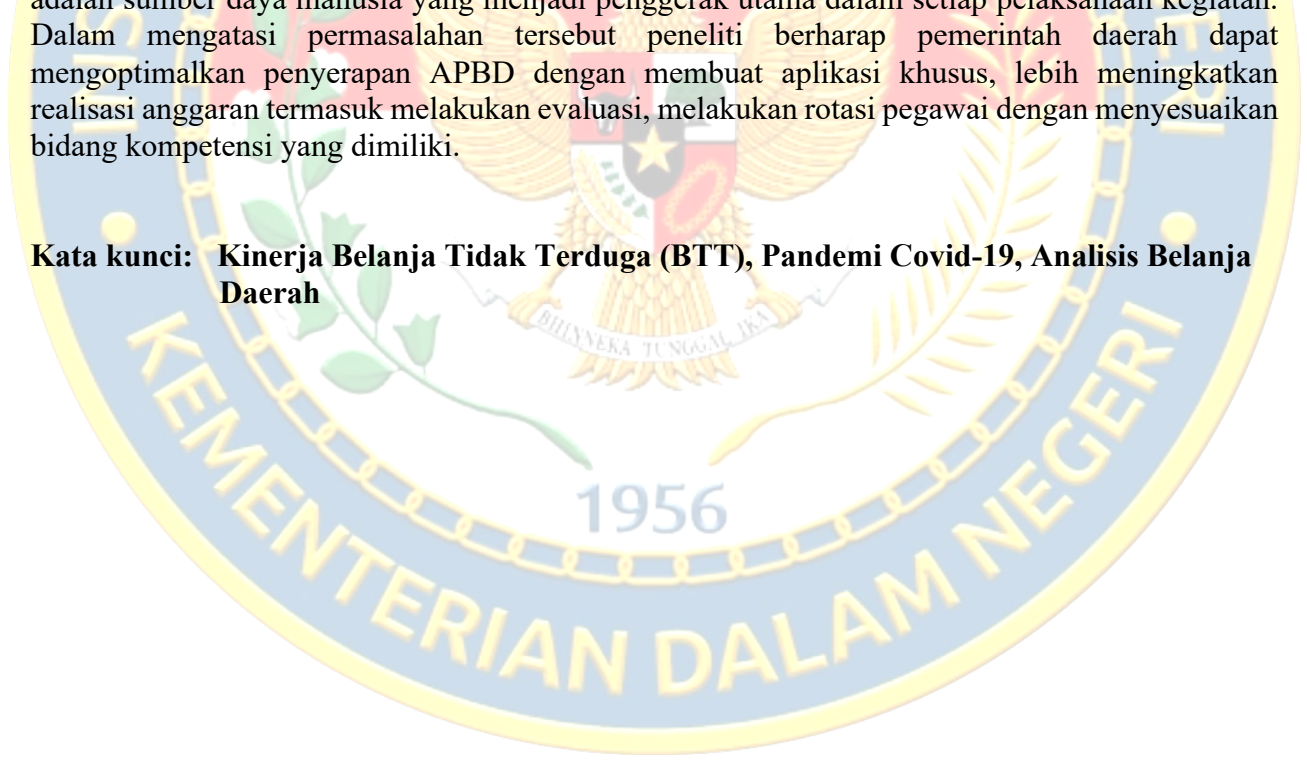
**Problem Statement/Background (GAP):** *(Contains the background behind the research). Unexpected Expenditures are budget expenditures at the expense of the APBD for certain emergencies. This research is motivated by the Covid-19 pandemic. **Purpose:** analyze the Unexpected Expenditure Performance (BTT) in Mamuju Regency for the 2018-2020 fiscal year which is an important factor in the context of implementing the authority of the local government to anticipate, overcome and make efforts to accelerate the handling of the covid-19 pandemic that occurred. **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation. **Result:** shows the analysis of the BTT compatibility ratio of the regional government of Mamuju Regency is in a fluctuating state due to the government continuing to change, especially at this time the Covid-19 pandemic is ongoing. The efficiency ratio of the regional government expenditure of the Mamuju Regency from the 2018 budget year is 95.87%. In 2019 it decreased by 1.44% to 94.43%. In 2020 it increased again by 1.88% to reach 96.31%. **Conclusion:** BTT is in a fluctuating state or adjusting to government conditions and for the efficiency of regional spending in Mamuju Regency in 2018-2020 it is in the range of 90%-100% or less than 100% which means it is included in the Efficient criteria and as for the factors that hinder BTT in the future. The COVID-19 pandemic in Mamuju Regency at the Regional Financial and Asset Management Agency is the human resource that is the main driver in every activity implementation. In overcoming these problems, the researcher hopes that the local government can optimize the absorption of the APBD by making special applications, further increasing the realization of the budget, including conducting evaluations, conducting employee rotations by adjusting the areas of competence they have.*

**Keywords:** *Unexpected Spending Performance (BTT), Covid-19 Pandemic, Regional Expenditure Analysis*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat tertentu. Penelitian ini dilatarbelakangi karena masa pandemi Covid-19. **Tujuan:** menganalisis Kinerja Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2018-2020 yang menjadi faktor penting dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi, mengatasi dapat melakukan upaya percepatan penanganan pandemi covid-19 yang terjadi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dimana penulis mendapatkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** menunjukkan analisis rasio keserasian BTT pemerintah daerah Kabupaten Mamuju berada pada keadaan fluktuatif yang disebabkan pemerintahan terus berubah-ubah terlebih pada saat ini sedang berlangsung pandemi Covid-19. Rasio efisiensi belanja daerah pemerintah Kabupaten Mamuju dari tahun anggaran 2018 sebesar 95,87%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,44% menjadi 94,43%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar 1,88% hingga mencapai 96,31%. **Kesimpulan:** BTT dalam keadaan fluktuatif atau menyesuaikan keadaan pemerintahan dan untuk efisiensi belanja daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2018-2020 berada pada rentang 90%-100% atau kurang dari 100% yang berarti termasuk dalam kriteria Efisien dan adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat BTT dalam masa pandemi covid-19 di Kabupaten Mamuju pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut peneliti berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penyerapan APBD dengan membuat aplikasi khusus, lebih meningkatkan realisasi anggaran termasuk melakukan evaluasi, melakukan rotasi pegawai dengan menyesuaikan bidang kompetensi yang dimiliki.

**Kata kunci:** Kinerja Belanja Tidak Terduga (BTT), Pandemi Covid-19, Analisis Belanja Daerah





## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) suatu wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua. Permasalahan dampak pandemi *Covid-19* yang meluas dari berbagai aspek kehidupan, Pemerintah menerbitkan berbagai regulasi terkait penanganan pandemi *Covid-19*. Berdasarkan Instruksi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia, bekerja secara padu dan terencana dalam menghadapi pandemi *Covid-19*, hingga pada tanggal 31 Maret 2020 diterbitkannya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan keuangan dalam rangka penanganan Pandemi *Covid-19*. Undang-Undang tersebut yang mempengaruhi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu penerimaan dana transfer pemerintah daerah.

Melakukan *refocusing* atau pemusatan kembali dana APBD serta proses realokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari langkah strategis dalam penanganan pandemi *Covid-19*. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan apbd. Kebijakan keuangan tersebut, Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd. Selain itu, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan apbd kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pelaksanaan Kebijakan *refocusing* dan realokasi dana APBD melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamuju, tidak terlepas dari kehadiran berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri antara lain: 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penanganan *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Daerah; 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; dan 3) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

Masyarakat diharapkan untuk dapat memberikan perhatian dalam pelaksanaannya termasuk melakukan pengawasan agar dalam prosedur penggunaan sampai penyalurannya tepat sasaran mengingat penganggaran tersebut diperuntukkan untuk percepatan penanganan pandemi *covid-19* di Kabupaten Mamuju tidak boleh dimanfaatkan dalam kegiatan yang tidak berhubungan dengan itu, karena menyangkut kesejahteraan bagi masyarakat sendiri. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan dalam latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis dan menyusun Skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS KINERJA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020”**.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan dampak pandemi Covid-19 yang meluas dari berbagai aspek kehidupan, Pemerintah menerbitkan berbagai regulasi terkait penanganan pandemi *Covid-19*. Melakukan *refocusing* atau pemusatan kembali dana APBD serta proses realokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari langkah strategis dalam melakukan penanganan pandemi *Covid-19*. Masyarakat diharapkan untuk dapat memberikan perhatian dalam pelaksanaannya termasuk melakukan pengawasan agar dalam prosedur penggunaan sampai penyalurannya tepat sasaran mengingat penganggaran tersebut diperuntukkan untuk percepatan penanganan pandemi *covid-19* di Kabupaten Mamuju tidak boleh dimanfaatkan dalam kegiatan yang tidak berhubungan dengan itu, karena menyangkut kesejahteraan bagi masyarakat sendiri.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Analisis APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa (Andre P. Tulango dan Treesje, 2016. UNSRAT). Penelitian kualitatif naturalistic. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian Hasilnya yaitu Dalam tiga tahun APBD Realisasi pendapatan pemda kabupaten minahasa belum baik sedangkan belanja sudah baik karena tidak melebihi jumlah yang diselenggarakan .



Kedua, Analisis Kinerja Belanja Dalam LRA Pada DPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Grace Yunita Liando dan Ingriani Elim, 2016.UNSRAT), Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil Penelitian yakni Lra belanja untuk T.ia 2011-2014 menunjukkan bahwa kinerja belanja Pemkab. Kepulauan Sangihe dinilai baik atau efektif dan efisien.

Ketiga, Analisis Kinerja Belanja Dalam LRA Pada BPKAD Kab. Serdang Bedagai (Fika Widya Apriyanti, dkk., 2019.UMN AL WASHLIYAH). Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja belanja dinilai baik dan menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan penyerapan realisasi anggaran.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

#### **1.5 Tujuan**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dikemukakan penulis adalah jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah disampaikan, yaitu:

1. Untuk menganalisis kinerja anggaran BTT dalam masa pandemi *covid-19* di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada TA 2020.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja BTT dalam masa pandemi *covid-19* di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Pada TA 2020.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif.(Arikunto, S. (2006)). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti

menghimpun data dengan melakukan wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kinerja Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju**

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan menginformasikan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun lalu menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Rancangan DPA-SKPD berisi rincian dari program, kegiatan, fungsi, sasaran yang ingin dicapai, dan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, serta rencana penggunaan dana pada setiap satuan kerja dan pendapatan yang diperkirakan. Selanjutnya Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Laporan tersebut diserahkan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas antara DPRD dan pemerintah daerah. Selanjutnya penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

#### **3.2 Analisis Data**

Analisis data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan analisis belanja daerah untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*) termasuk sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah Kabupaten Mamuju, dapat dibuat analisis anggaran khususnya analisis belanja tentang analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja pada BTT sebagai fokus utama penelitian dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Wahab, Solichin. (2008).), yaitu sebagai berikut :



## A. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah Kabupaten Mamuju perlu membuat harmonisasi belanja.

Untuk mengetahui analisis kinerja Belanja Tidak Terduga (BTT) maka menggunakan Analisis Belanja Tidak Langsung dan Tidak Langsung karena BTT sendiri termasuk kedalam Belanja Tidak Langsung yang merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Dalam penyelenggaraan pemerintahan analisis tersebut bermanfaat untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (*cost & budgetary control*) khususnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamuju.

Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Laporan Realisasi Anggaran menjadi tolok ukur dalam menghitung rasio keserasian BTT terhadap total belanja. kondisi pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju terus mengalami perubahan dari tahun ketahunnya. tahun 2016 merupakan tahun realisasi terendah dan tahun 2019 merupakan tahun realisasi tertinggi untuk anggaran belanja daerah Kabupaten Mamuju karena kondisi pengeluaran Pemerintah Daerah terus mengalami perubahan dari tahun ketahunnya disesuaikan dengan kebutuhan dari pemerintah daerah. Melihat dari perkembangan tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Mamuju terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengendalian anggaran dan biaya. Dilihat dari jumlah rasio keserasian BTT pemerintah daerah Kabupaten Mamuju berada pada keadaan fluktuatif yang disebabkan keadaan pemerintahan yang terus berubah-ubah terlebih pada saat ini sedang berlangsung pandemi *covid-19* dan pemerintah daerah yang mulai secara intensif memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi masyarakatnya. Rasio keserasian secara keseluruhan menunjukkan pengeluaran pemerintah daerah khususnya dalam hal belanja tidak terduga sangat dipengaruhi kondisi atau keadaan yang sedang terjadi pada lingkungan pemerintahan maka diperlukan penyesuaian yang cepat dan tepat sasaran agar proses realisasi anggaran semakin membaik serta diharapkan dapat membiayai pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat serta membantu dalam percepatan penanganan pandemi *covid-19* di Kabupaten Mamuju sehingga kehidupan masyarakat lebih membaik dan mendapatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

## **B. Rasio Efisiensi Belanja**

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamuju khususnya dalam masa pandemi *covid-19* TA 2020. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif.

Efisiensi belanja daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 hingga tahun 2020 berada pada rentang 90%-100% atau kurang dari 100% yang berarti termasuk dalam kriteria Efisien dalam hal kinerja belanja daerahnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah Kabupaten Mamuju telah optimal memanfaatkan anggaran kemudian disertai pengendalian pengeluaran belanja daerah secara baik maka setiap tahunnya belanja daerah jumlahnya lebih sedikit dari pendapatan daerah sehingga terdapat sisa dari pendapatan daerah yang seharusnya dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam masa pandemi *covid-19* di Kabupaten Mamuju.

Pada setiap tahunnya realisasi belanja daerah Kabupaten Mamuju terus mengalami perubahan hal ini dapat membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Mamuju terus berusaha dalam menyelenggarakan pemerintah yang lebih baik agar berlangsung secara optimal dan efisien disesuaikan dengan tingkat kebutuhan daerah.

### **4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Kinerja BTT Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Pada TA 2020.**

#### **Faktor Pendukung:**

#### **1. Sumber daya manusia**

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada rasio efisien yang menunjukkan kinerja belanja pemerintah daerah Kabupaten Mamuju masih dalam kategori efisien hal ini disebabkan oleh kualitas dari sumber daya manusia seperti operator yang mampu mengoperasikan aplikasi sistem informasi keuangan yang dapat memudahkan dalam pengelolaan anggaran.

#### **2. Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Dilihat dari hasil perhitungan analisis keserasian dan efisiensi belanja daerah yang menyatakan bahwa tingkat keserasian efisiensi belanja daerah Kabupaten Mamuju dalam kategori efektif dan efisien yang berarti kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah berlangsung cukup



baik hal ini akibat dari pemerintah daerah yang senantiasa berupaya untuk menggali potensi daerah yang ada serta sebisa mungkin menghindari kelalaian dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

### **Faktor Penghambat :**

#### **1. Pelayanan publik**

faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja BTT dalam masa pandemi covid-19 di Kabupaten Mamuju pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

#### **2. Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat**

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dapat menjadi faktor penghambat juga dalam efektivitas pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat masih terdapat masyarakat yang tidak jujur saat pendataan sebagai penerima bantuan sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih penerima bantuan, terdapat data penerima ganda dan tidak meratanya masyarakat yang menerima bantuan.

### **4.4 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Belanja Kabupaten Mamuju**

#### **1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

Dengan perbaikan jasa layanan serta meningkatkan fasilitas publik akan memberikan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu dimana hal tersebut secara langsung akan mendorong peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD kabupaten Mamuju. Dengan kata lain, dengan melakukan peningkatan dalam kualitas pelayanan bagi masyarakat akan menghasilkan daerah dengan kinerja keuangan yang baik.

#### **2. Penyusunan Program Yang Tepat Sasaran**

Upaya di atas pemerintah daerah juga mengeluarkan regulasi yang mengatur dengan jelas tentang BTT ini yaitu pada Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 tahun 2022 dijelaskan bahwa untuk pemberian Anggaran belanja tidak terduga kepada masyarakat yang terkena dampak akibat adanya virus covid-19 atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal dan individu/masyarakat yang memiliki resiko sosial akibat adanya pandemi virus covid-19,

fasilitas kesehatan yang ikut dalam melakukan penanganan virus covid-19, instansi vertikal yang wilayah kerjanya di wilayah Kabupaten Mamuju dalam rangka mendukung penanganan virus covid-19.

#### **4.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Analisis APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa (Andre P. Tulango dan Treesje, 2016.UNSRAT). Temuan penelitiannya yaitu Dalam tiga tahun APBD Realisasi pendapatan pemda kabupaten minahasa belum baik sedangkan belanja sudah baik karena tidak melebihi jumlah yang diselenggarakan .Analisis Kinerja Belanja Dalam LRA Pada DPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Grace Yunita Liando dan Ingriani Elim, 2016.UNSRAT), temuan Penelitiannya yakni Iri;a belanj;a untuk T.ia 2011-2014 menunjukkan b;ahw;a kinerja belanj;a Pemkab. Kepulauan Sangihe dinilai baik atau efektif dan efisien.

Analisis Kinerja Belanja Dalam LRA Pada BPKAD Kab. Serdang Bedagai (Fika Widya Apriyanti, dkk., 2019.UMN AL WASHLIYAH)temuan penelitiannya yakni menunjukkan b ahw a kinerja belanja dinilai baik dan menunjukkan bahwa adanya penghem at an penggunaan penyerapan re alis i anggaran.Pembaharuan temuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dalam mendukung perencanaan tugas dan guna mencapai sasaran yang ada telah mampu untuk membuat program-program yang sangat membantu sebagai bagian dari perencanaan dinas baik itu untuk memajukan kesejahteraan tenaga pendidik serta mutu dan kualitas tenaga pendidik.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di lokasi magang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju melalui hasil wawancara serta data-data yang diperoleh selama penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penghitungan dapat diketahui bahwa rasio tertinggi pada tahun 2020 yakni sebesar 2,50% dan yang terendah pada tahun 2019 yakni sebesar 0,02%. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 0,06%. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dalam mendukung perencanaan tugas dan guna mencapai sasaran yang ada telah mampu untuk membuat program-program yang sangat membantu sebagai



bagian dari perencanaan dinas baik itu untuk memajukan kesejahteraan tenaga pendidik serta mutu dan kualitas tenaga pendidik.

2. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja BTT pemerintah daerah Kabupaten Mamuju.

**Faktor pendukung:**

- a. Sumber daya manusia
- b. Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

**Faktor penghambat :**

- a. Pelayanan publik
  - b. Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat
3. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan kinerja keuangan daerahnya adalah sebagai berikut :
    - a. Meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak sehingga penerimaan daerah dapat terus meningkat sehingga dapat digunakan kembali untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    - b. Penyusunan Program Yang Tepat Sasaran

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Dengan Analisis Kinerja Belanja Tidak Terduga (Btt) Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2006). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Bagir, Manan.(1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Berg, Bruce L. (2001). *Qualitative Research Method For The Social Sciences: Fourth Edition*. Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: A Pearson Education Company.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia.
- Creswell, J.W. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Third Edition. Washington DC : Sag
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.